

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1944 diadakan Konferensi Buruh Internasional di Philadelphia yang kemudian menghasilkan “*Deklarasi Philadelphia*”. Isi dari konferensi tersebut tentang kebutuhan penting untuk menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia apapun ras, kepercayaan atau jenis kelaminnya, memiliki hak untuk mengejar perkembangan material dan kesempatan yang sama. Semua hak-hak tersebut setelah Perang Dunia ke-II (setelah Hitler memusnahkan berjuta-juta manusia) dijadikan dasar pemikiran untuk menjadi embrio rumusan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat universal sebagaimana dalam *The Universal Declaration of Human Rights* PBB tahun 1948.¹ Akibat dengan dikeluarkannya piagam HAM secara umum oleh PBB ini, maka hampir seluruh dunia mendukung isi piagam ini dan semakin banyak pula dari negara-negara lain yang ikut menjadi anggota PBB, termasuk Indonesia.

Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh PBB, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya,

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 2008, (Jakarta:Rieneka Cipta), Hal.23

klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Berdasarkan penjelasan ini, maka pada perkembangannya piagam Hak Asasi Manusia (HAM) yang diterbitkan oleh PBB ini seolah-olah menjadi legelitas sekelompok orang untuk menjatuhkan suatu hukum yang sudah berlaku baik tertulis maupun tidak dari segala macam bentuk pidana pada suatu negara.

Tindak pidana dalam Ilmu Hukum Pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana perumusan atau definisi tentang tindak pidana tersebut, dan di samping adanya persamaan, terdapat juga perbedaannya. Prof Moeljatno, S.H. telah memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai, perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, Berdasarkan penjelasan ini bahwa menurut wujud atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu, melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan pidana.²

²Ibid., hal. 26

Poin pertama dan kedua menunjukkan sifat perbuatan, sedangkan yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah poin tiga dan empat. Adapaun kejahatan terhadap jiwa seseorang di atur di dalam BAB XIX Buku II KUHP. Bentuk yang pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslag*) yakni menghilangkan jiwa seseorang. Kejahatan terhadap jiwa seseorang mempunyai hubungan erat dengan kejahatan terhadap badan atau tubuh seseorang. Kejahatan terhadap badan itu dapat juga menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang, meskipun akibat ini tidak dikehendaki, sedangkan kejahatan terhadap jiwa seseorang mempunyai kehendak hilangnya jiwa seseorang.

Pada kejahatan terhadap jiwa seseorang menimbulkan akibat mati. Akibat matinya seseorang ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Kejahatan terhadap jiwa merupakan kejahatan yang bersifat materiil, dimana akibatnya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (tindak pidana materiil). Dalam praktek kejahatan terhadap jiwa ini meliputi jumlah yang besar setelah kejahatan terhadap harta benda. Oleh sebab itu pada Pasal 338 KUHP Buku II Titel XIX disebutkan, barangsiapa yang dengan sengaja menghilangkan jiwa orang, karena pembunuhan biasa, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.³

Tujuan hukuman dalam hukum pidana umum di Indonesia adalah bahwa hukum pidana tidak berisi norma-norma baru, ia tidak meletakkan sebuah

³ Dali Mutiara Djaksa Kepala Jakarta, 1953, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Indonesia*, (Jakarta: Suara Jakarta), hal. 147

kewajiban yang belum dikenal sebelumnya, dengan demikian maka hukum pidana itu tidak melahirkan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman di dalam hidup pergaulan, karena hukum pidana merupakan “hukum sanksi” Artinya adalah, hukum pidana itu diterapkan adalah untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Akan tetapi kenyataan di lapangan adalah, meskipun hukum pidana umum ini diterapkan dan dengan mengatasnamakan hak asasi manusia, kejahatan terhadap manusia dengan menghilangkan nyawa masih terus terjadi di muka bumi ini, termasuk Indonesia yang mayoritas masyarakatnya muslim. Berdasarkan permasalahan di atas, Islam menawarkan konsep penting tentang masalah kejahatan terhadap nyawa manusia, dengan menyebutkan bahwa tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) disebut dengan *al-jinayah ‘ala al-insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia), sebutan ini sama dengan pengertian pembunuhan dalam hukum positif. Di dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 32, Allah swt berfirman :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ جَمِيعَ النَّاسِ
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ
ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa

*yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”*⁴

Berdasarkan pada ayat inilah kemudian pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Kemudian mazhab Maliki membagi pembunuhan menjadi dua macam: pembunuhan sengaja dan pembunuhan tak sengaja, sedangkan para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu:

1. pembunuhan sengaja (*qatl al-‘amd*)

suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya;

2. pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-‘amd*)

perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian, dan

3. pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata’*), yaitu pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud dan kelalaian.⁵

Dalam pandangan hukum pidana Islam, bagi orang yang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, maka hukum akan menjatuhkan sanksi pidana yang sangat berat, yakni dengan tindak pidana mati atau hukuman *qishash*. Namun, pelaksanaan hukuman itu diserahkan pada putusan keluarga si terbunuh.

⁴ Departemen Agama, *Terjemahan Al-Quranul Karim*, 1990, (Kudus: Menara Kudus), Hal. 346

⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, 2003, (Jakarta: Gema Insani Press), hal. 36

Pilihannya, apakah tetap dilaksanakan hukuman *qishash* atau dimaafkan dengan penggantian berupa denda sebesar yang ditetapkan keluarga si terbunuh. Dengan demikian, maka dapat di fahami bahwa dalam hukum Islam, tujuan diadakannya hukum *qishash* adalah, untuk melindungi hak Allah atas hamba dalam masyarakat, terutama menyangkut hak hidup seseorang.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa setiap perbuatan hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang maka dapat terkena pada dirinya hukum *qishash-diyat*. Namun, akibat perkembangan zaman yang begitu pesat, mudahnya akses hubungan internasional, cepat menyebarnya berita-berita di dunia, maka pada saat itu pula mulai banyak dari para intelektual Islam yang menjadikan materi-materi asing sebagai sebuah pendekatan dalam menentukan hukum, salah satunya adalah melalui pendekatan sosial (termasuk di dalamnya Hak Asasi Manusia) dan maksud-maksud hukum (*maqashid al-syari'ah*).

Melalui pendekatan-pendekatan ini maka timbullah permasalahan tentang relevansi *qishash* dalam Islam di era modern ini. Bagi kelompok liberal (yang banyak dipelopori oleh JIL), pembahasan *qishash* adalah pembahasan kuno karena hal itu merupakan tradisi bangsa arab pra-Islam yang kemudian dimasukkan ke dalam bagian hukum Islam, dan bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah* untuk menjaga jiwa manusia. Maka pertanyaan mendasar yang menjadi masalahnya adalah, wajarkah jika menjaga jiwa ini diartikan seperti yang diterangkan oleh jumhur ulama, bahwa jika orang membunuh maka ia juga harus dibunuh? dimanakah bentuk penjagaan atas jiwa yang secara adil dalam hukum *qishash* ini?

Dan apakah pengertian yang adil dalam firman Allah “*kecuali yang hak (untuk dibunuh)*”.⁶

Dalam Islam, masyarakat lebih diutamakan di atas perorangan, dan karenanya kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan bukan sebaliknya. Oleh sebab itu setiap kriminal yang di lakukan mengganggu kedamaian ketentraman masyarakat akan di anggap sebagai kejahatan terhadap Allah, sang pencipta, sebagaimana telah kita ketahui, masyarakat tidak berhak dzalim pribadi anggotanya jika kepentingan para individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain ataupun masyarakat.

Dengan latar belakang ini syariat tidak setuju dengan teori sistematik atau pengujian untuk menentukan masalah abnormalitas dan kriminalitas. Menurut teori sistematis ini, “tidak ada tindakan yang dapat disebut kriminal kalau padasaat tindakan itu dilaksanakan, pelakunya mengalami kekacauan mental arau adanya dorongan tak terhenti yang benar-benar tidak tertahankan sehingga menyebabkan hilangnya keseimbangan mental ataupun emosi”.⁷

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai penjelasan yang di uraikan dalam latar belakang, dapat di ambil sebagai rumusan masalah di antaranya adlah sebagai berikut:

1. Bagaimana awal mula dari pembentukan hukum di Indonesia.
2. Bagaimana penerapan hukum pidana di Indonesia.

⁶<http://rae-blogs.blogspot.com/2011/08/hukum-qishash-antara-akal-dan-nurani.html>

⁷Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, 1992, (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 2-3

3. Bagaimana hukum pidana dapat mengganti qishas di Indonesia

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan hukuman dalam hukum pidana umum di Indonesia adalah, bahwa hukum pidana tidak berisi norma-norma baru, ia tidak meletakkan sebuah kewajiban yang belum dikenal sebelumnya, dengan demikian maka hukum pidana itu tidak melahirkan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman di dalam hidup pergaulan, karena hukum pidana merupakan “hukum sanksi”.

Artinya adalah, hukum pidana itu diterapkan adalah untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Tujuan menjawab dari rumusan masalah, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui awal mula dari pembentukan hukum di Indonesia.
2. Mengetahui penerapan hukum pidana di Indonesia.
3. Mengetahui bahwa hukum pidana dapat mengganti qishas di Indonesia

D. Tinjauan Pustaka

Untuk membandingkan dengan penelitian lain, penulis menelusuri penelitian lain yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini yang bisa menjadi rujukan baik teori ataupun metodenya saja, diantaranya:

Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi tentang Kekerasan dalam dunia pendidikan, oleh Moh Iqbal Taufik Nasution, 2012, (Universitas Indonesia

Yogyakarta). Pada penelitian sebuah skripsi ini memaparkan tentang tinjauan hukum pidana dan tindakan kriminalitas berupa kekerasan dalam dunia pendidikan, Berbeda dengan penelitian penulis lebih kepada hukum pidana sebagai pengganti qishas yang ada di negara Indonesia.

Penerapan Sanksi pidana Penipuan yang di lakukan secara berlanjut di pengadilan negeri karanganyar, 2010, (Universitas Sebelas maret Surakarta).

Pada penelitian sebuah skripsi ini memaparkan tentang tinjauan hokum pidana yang berupa penipuan, peneliti ini menjelaskan hukum yang ada di pengadilan karanganyar sedangkan penulis menjelaskan hukum yang masih bersifat umun dan objeknya berada di Indonesia.

Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka dan Potensi Pelanggarannya pada Penyidikan PerkaraPidana, 2009, (Universitas Sebelasmaret Surakarta). Pada penelitian sebuah skripsi ini menganalisa studi kasus yang mengartikan bahwa hokum melindungi hak pada perkara pidana denangkan penulis memaparkan hokum pidana sebagai qihash.

Jadi penulis menegaskan bahwa penelitian dalam judul ini belum pernah ada yang melakukan sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian biasa diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁸Guna memperoleh informasi sesuai

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, 2006, (Bandung: Alfa Beta),hal. 3

dengan tujuan yang dirumuskan dalam permasalahan atau tujuan penelitian perlu suatu desain atau rencana menyeluruh tentang urutan kerja penelitian dalam bentuk suatu rumusan operasional suatu metode ilmiah, rincian garis-garis besar keputusan sebagai suatu pilihan serta dasar-dasar atau alasan-alasan ilmiahnya. Sebagai suatu rancangan penelitian, diantara unsur yang hendak dipaparkan adalah tentang:

1. Jenis Penelitian

Penulis mengambil jenis penelitian kualitatif, karena secara umum penelitian kualitatif digunakan untuk memahami realita dan fakta, penelitian kualitatif ini menggunakan metode historis, penelitian historis berpijak pada data yang ada, bisa merupakan sumber primer (*primary sources*) maupun sumber sekunder (*secondary sources*).

Metode historis bertujuan merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi, dan mensintesis bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan.⁹

2. Sumber data

Data-data yang bersangkutan dengan penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

⁹Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, 2004, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hal.22

Sumber data primer merupakan hasil dari saksi mata dari suatu peristiwa, dapat berupa orang atau benda (*tape recorder* atau kamera) yang hadir dalam peristiwa tertentu. Peneliti sejarah membedakan dua jenis sumber primer: *record* dan *relics*. *Record* merupakan kesaksian mata di sengaja (dokumen, rekaman lisan, atau karya seni). *Relich* merupakan rekaman peristiwa yang tidak dimaksudkan untuk merekam peristiwa sejarah. Catatan neraca keuangan, tradisi masyarakat, dan peralatan atau musiu dapat di masukkan ke dalam kelompok *relics*.¹⁰ Teknik survei dalam pengumpulan data primer dapat memberi data mengenai sikap, perasaan, pengalaman, kepercayaan, keinginan, pengetahuan dan karakteristik pribadi.¹¹

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan data sekunder penulis menyajikan dengan mengambil buku-buku yang bersangkutan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak pidana serta hubungan sebagai ganti qishas di Indonesia.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk bisa memperoleh data yang baik, penulis berusaha sebaik mungkin dengan dapat menyajikan data-data melalui metode observasi, dokumentasi serta wawancara (*interview*) .

¹⁰*Ibid.*, hal.23-24

¹¹Supramono dan Jony Oktavian Haryanto, *Desain Proposal penelitian Studi Pemasaran*, 2005, (Yogyakarta: Penerbit Andi), hal.71

1. Metode Observasi

Sebagai sumber Primer yaitu memperhatikan, menguasai, mengamati, memeriksa, pemriksaan yang bertujuan atau di sengaja terhadap sesuatu, khususnya untuk mengumpulkan fakta. Atau suatu kajian ternama, di sengaja, dan iitmatik tentang gejala tertentu melalui pengamatan dan penelitian. Pengungkapan hasil pengamatan.¹²

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara yang dipergunakan peneliti untuk mendapatkan data yang berupa data sekunder (data yang sudah dikumpulkan orang lain) yang berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, legger dan sebagainya.¹³

Metode dokumentasi berupa data-data dari majalah fokus mulai edisi pertama sampai edisi ke delapan.

3. Metode Wawancara (*interview*)

Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah berupa manusia dalam posisi sebagai narasumber atau informan. Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara.¹⁴

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan

¹² Komaruin, Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, 2000, Jakarta, Bumi Aksara, Hal.163

¹³ Syam Nur, *Metodologi Penelitian Dakwah*, Solo: Ramadhani, 1991, hal.109

¹⁴ Nur Khoiri, *Konsep dan Dasar Penelitian*, Jepara: INISNU Jepara, 2006-2007, hlm. 48.

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun metodewawancara di lakukan penulis untuk mencari data-data tentang masalah hukum dengan cara langsung kepada pihak kepolisian serta pihak yang terkait.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁵

Sebagai langkah untuk mencari kesimpulan dari data yang penulis peroleh, maka penulis mengadakan analisis dengan menggunakan analisis isi. Dalam analisis isi ini yang akan di lakukan adalah pembentukan data, redaksi data penarikan referensi dan analisis isi.

Beberapa langkah analisis isi di atas akan dapat di jadikan landasan bagi penyusunan dan pembahasan karya tulis dalamsatu kesatuan. Sehingga dapat di tarik secara obyektif dan sistematik suatu hukum khusus pidana dari yang terdapat pada beberapa sumber.¹⁶

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan dan terkait erat. Adapun sistematikanya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), Cet. 14, hlm. 103.

¹⁶ M. Ridho Syababi, *Metodologi Ilmu Dakwah*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2007, hal.18

1. Bagian Awal

Pada bagian ini memuat beberapa halaman, yaitu terdiri dari : halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan , kata pengantar, moto penulis, persembahan, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat lima bab terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan, bab ini terdiri Latar Belakang Masalah, alasan penulisan judul, pengertian dan penegasan istilah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknik analisa data dan sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka Teori, bab ini terdiri dari teori-teori serta metode dalam melakukan penelitian yang mencakup pengertian dari hukum qishas serta hubungannya dengan hukum yang ada di Indonesia.

BAB III : Obyek Penelitian, bab ini terdiri dari data-data yang berhubungan tentang hukum pidana serta bagaimana realisasi qishas hukum di Indonesia.

BAB IV : Analisis Data, bab ini membahas tentang analisis yang sudah dikaji dalam data-data atau isi pembahasan dari hukum pidana serta hubungan qishas hukum di Indonesia mulai dari era reformasi hingga sekarang.

BAB V : Kesimpulan Dan Penutup, bab kelima ini adalah bab terakhir yang menguraikan tentang kesimpulan, saran-saran serta penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat halaman daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis, serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan kegiatan dan proses pembuatan skripsi.